



Media Title	Investor Daily		
Head Line	PPJT Proyek Tol akan Direvisi		
Date	11 Feb 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	ean	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

PPJT Proyek Tol akan Direvisi

JAKARTA – Pemerintah menyatakan akan mengubah sejumlah klausul dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) terkait proses pembebasan lahan menjelang tahun 2015 mendatang. Perubahan ini dilakukan menyusul akan diterapkannya UU No 2/2012 pada tahun depan. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali mengatakan, dengan pemberlakuan UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut, maka proses pembebasan tanah di proyek jalan tol akan menggunakan dana APBN. Dengan demikian, pemerintah yang akan bertanggung jawab terkait proses pembebasan lahan.

Selama ini proses pengadaan tanah menggunakan dana dari badan usaha jalan tol (BUJT) yang ditalangi melalui Badan Layanan Umum (BLU) BPJT. "Nanti dalam PPJT harus dimasukkan nilai tanah yang harus dikembalikan kepada negara atau dibayarkan oleh BUJT. Otomatis mulai 2015, pasal tentang pembebasan tanah di PPJT ada yang perlu diubah," papar dia di Jakarta, baru-baru ini.

Lebih jauh, dia menegaskan, BUJT hanya akan mengembalikan biaya pembebasan tanah yang menjadi kewajibannya bila tanah sudah tuntas 100%.

Hal ini karena dalam tiap proyek jalan tol, PPJT yang terkait kewajiban BUJT dalam pembebasan lahan juga berbeda-beda. Terkadang pemerintah juga ikut berpartisipasi, baik dalam pembebasan lahan maupun konstruksi fisik.

Dia menambahkan, saat UU No 2/12 diterapkan pada tahun depan, BUJT bisa menghentikan proses pembebasan lahannya. Selanjutnya, proses tersebut akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan dipimpin oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Jadi, Bina Marga yang akan maju untuk selesaikan itu," tutur dia.

Gani memastikan, penerapan UU baru ini tak akan mengganggu proses pengadaan tanah untuk proyek tol yang masih berjalan saat ini. Hal itu karena hingga akhir tahun ini proses pengadaan lahan masih menggunakan aturan lama. "Tidak akan mengganggu rencana pengerjaan jalan tol yang berjalan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga Achmad Herry Marzuki sebelumnya mengatakan, pihaknya memprioritaskan pembebasan lahan di tujuh ruas tol tuntas pada akhir 2014 dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara

(APBN) sebesar Rp 1,1 triliun. Dengan demikian, tujuh jalan tol ini dapat segera dikonstruksi hingga nantinya bisa beroperasi.

Ketujuh ruas tol itu adalah tol Solo-Mantingan I dan II, tol Mantingan-Kertosono I dan II, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, dan Palembang-Indralaya. "Tujuh ruas tol ini merupakan bagian dari 11 ruas tol yang pengadaan tanahnya dibiayai oleh APBN," tutur dia.

Menurut dia, rata-rata progres pengadaan lahan ketujuh ruas tol tersebut sudah mencapai di atas 75% per akhir Januari 2014. Dengan demikian, penuntasan proses pengadaan lahan di tujuh ruas tol tersebut dinilai dapat segera diselesaikan. "Saat ini progres pembebasan lahan masih terus didata, dan hingga pertengahan Februari ini akan ada banyak laporan," papar dia.

Selain menuntaskan pembebasan lahan tujuh ruas tol, pemerintah juga mengejar penyelesaian pengadaan lahan untuk ruas tol lain yang dibiayai oleh APBN. Beberapa ruas tol lain itu adalah tol Pandaan-Malang, Pekanbaru-Kandis-Dumai, Pasir Koja-Soreang, Medan-Binjai, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), dan Depok-Antasari. (ean)